

BAB II

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

2.1 Gambaran Umum Provinsi DKI Jakarta

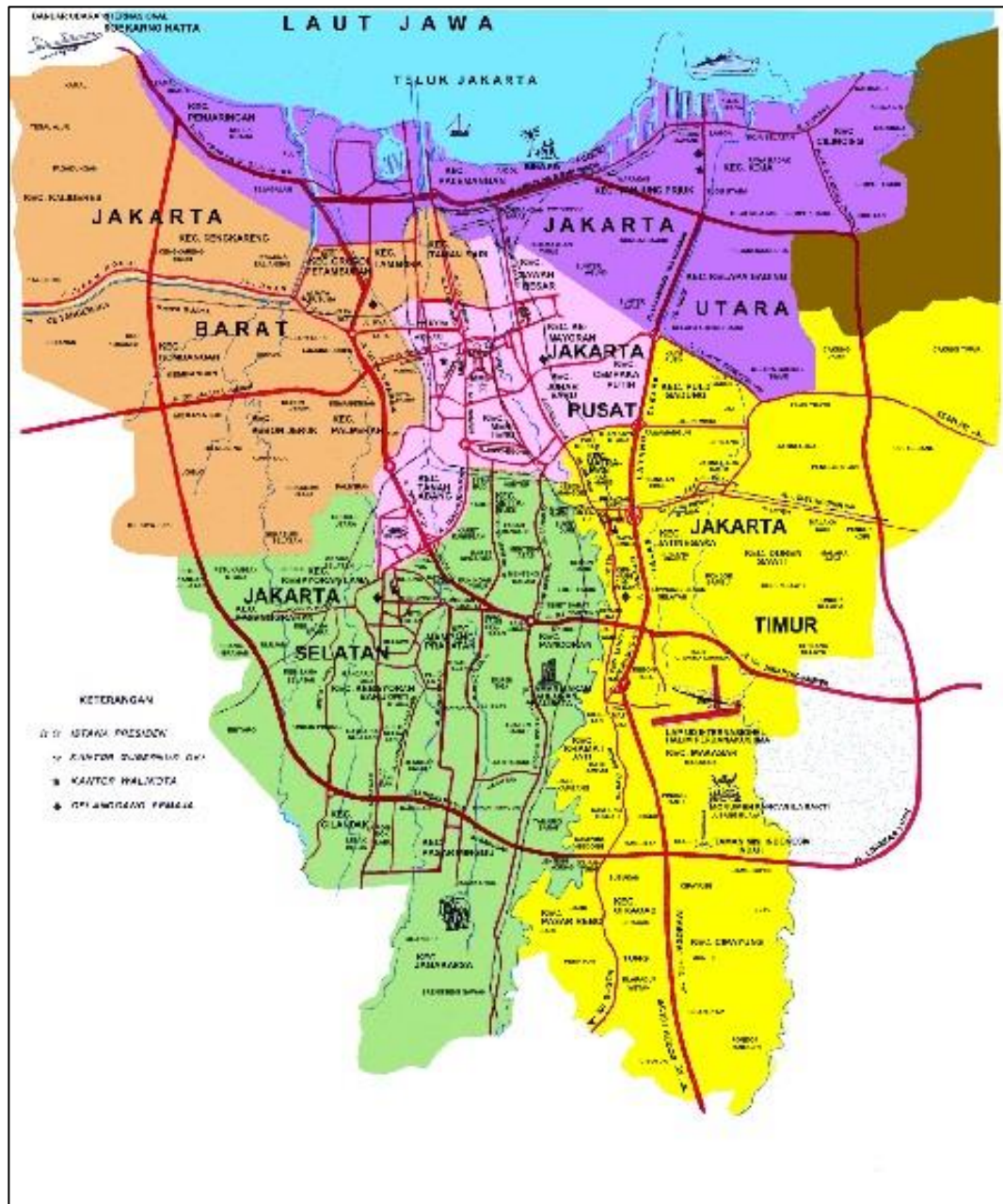
2.1.1 Keadaan Geografis

Provinsi DKI Jakarta dalam lingkup kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memiliki peran strategis, yaitu sebagai ibukota negara. Provinsi DKI Jakarta yang merupakan ibukota negara sehingga tidak memiliki kawasan terpencil maupun kawasan pedalaman. Secara astronomis Provinsi DKI Jakarta terletak antara 6°12' Lintang Selatan dan 106°48' Bujur Timur. Dilihat dari posisi geostrategis, Provinsi DKI Jakarta terletak di sisi utara bagian barat Pulau Jawa, dengan bagian utara berbatasan langsung dengan Laut Jawa, sedangkan sisi timur dan selatan Provinsi DKI Jakarta berbatasan langsung dengan wilayah Provinsi Jawa Barat, serta sisi barat yang berbatasan dengan Provinsi Banten.

Sebagian wilayah Provinsi DKI Jakarta merupakan kawasan pesisir, dengan luas wilayah pesisir sekitar 155 km yang membentang dari timur ke barat kurang lebih 35 km, dan menjorok ke darat sekitar 4-10 km. Selain memiliki kawasan pesisir, DKI Jakarta juga memiliki 110 pulau yang tersebar pada 2 (dua) Kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Gambar 2.1

Peta Provinsi DKI Jakarta



Sumber: Jakarta.go.id

DKI Jakarta dianalisis dari aspek ketinggian dan kemiringan lahan, yaitu terletak pada dataran rendah dengan ketinggian rata-rata kurang lebih 7 meter di

atas permukaan laut. Sedangkan, sekitar 40 persen wilayah Provinsi DKI Jakarta berupa dataran yang permukaan tanahnya berada 1-1,5 meter di bawah muka laut pasang. Dengan kondisi kemiringan lahan yang demikian, ditambah dengan 17 sungai yang mengalir di Provinsi DKI Jakarta menyebabkan kecenderungan semakin rentannya wilayah Jakarta tergenang air dan banjir pada musim hujan. Terlebih jika melihat tingginya tingkat perkembangan wilayah di sekitar Jakarta, menyebabkan rendahnya resapan air kedalam tanah, yang pada gilirannya akan memperbesar ancaman banjir di wilayah Jakarta.

2.1.2 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 171 tahun 2007 tentang Penataan, Penetapan Batas dan Wilayah Kelurahan di Provinsi DKI Jakarta, secara geografis luas wilayah DKI Jakarta adalah 7.639.83 km², dengan luas daratan 662,33 km² termasuk 110 pulau yang tersebar di Kepulauan Seribu, dan luas lautan 6.977,5 km².

Dalam hal administrasi pemerintahan, Provinsi DKI Jakarta dibagi menjadi 5 (lima) Kota Administrasi dan 1 (satu) Kabupaten Administrasi. Hal tersebut ditujukan agar meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar lebih efektif dan efisien. Wilayah Kecamatan dibagi menjadi 44 Kecamatan, dan Kelurahan menjadi 267 Kelurahan, dengan rincian sebagai berikut

Tabel 2.1
Pembagian Wilayah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016

No.	Kota/ Kabupaten Administrasi	Luas Area (km ²)*	Jumlah			
			Kecamatan*	Kelurahan*	RW**	RT**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Jakarta Pusat	48,13	8	44	390	4.577
2.	Jakarta Utara	146,66	6	31	448	5.181
3.	Jakarta Barat	129,54	8	56	584	6.467
4.	Jakarta Selatan	141,27	10	65	576	6.081
5.	Jakarta Timur	188,03	10	65	705	7.904
6.	Kepulauan Seribu	8,70	2	6	25	127
Jumlah		662,33	44	267	2.728	30.337

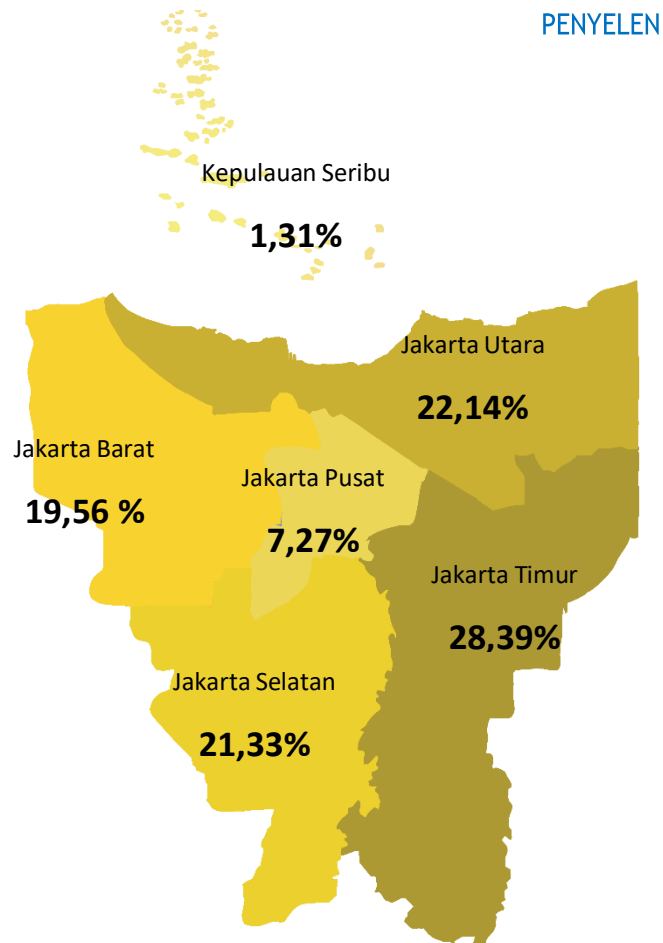
*) Sumber: Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 171 Tahun 2007

***) Sumber: Biro Tata Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta 2016

Wilayah DKI Jakarta yang terluas ialah Kota Administrasi Jakarta Timur, yaitu 28,9 persen dari luas Provinsi DKI Jakarta, sedangkan wilayah terkecil ialah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dengan luas 1,31 persen.

Gambar 2.2

Komposisi Pembagian Wilayah Kota dan Kabupaten Administrasi



Sumber: Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 171 Tahun 2007

2.1.3 Visi dan Misi

2.1.3.1 Visi Provinsi DKI Jakarta

Visi pembangunan jangka menengah DKI Jakarta yang terdapat pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2017 adalah sebagai berikut:

“Jakarta Baru, kota modern yang tertata rapi, menjadi tempat hunian yang layak dan manusiawi, memiliki masyarakat yang berkebudayaan, dan dengan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik.”

2.1.3.2 Misi Provinsi DKI Jakarta

Dalam rangka mencapai visi pembangunan jangka menengah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017, dirumuskan sejumlah misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan Jakarta sebagai kota modern yang tertata rapi serta konsisten dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.
2. Menjadikan Jakarta sebagai kota yang bebas dari masalah-masalah menahun seperti macet, banjir, pemukiman kumuh, sampah, dan lain-lain
3. Menjamin ketersediaan hunian dan ruang publik yang layak serta terjangkau bagi warga kota.
4. Membangun budaya masyarakat perkotaan yang toleran, tetapi sekaligus memiliki kesadaran dalam memelihara kota.
5. Membangun pemerintahan yang bersih dan transparan serta berorientasi pada pelayanan publik.

2.1.4 Penggunaan Lahan

Perkembangan fisik wilayah DKI Jakarta ditandai oleh semakin luasnya lahan yang terbangun. Perkembangan lahan terbangun berlangsung pesat diiringi dengan pertumbuhan penduduk dan aktifitasnya. Kecenderungan tersebut

menjadi indikasi bahwa ketersediaan lahan juga merupakan suatu permasalahan bagi pembangunan Provinsi DKI Jakarta. Pembangunan fisik di Jakarta mengalami perkembangan yang cukup signifikan yang ditandai dengan pembangunan gedung perkantoran, sarana ekonomi dan sosial, serta infrastruktur-infrastruktur lain penunjang kota. Penggunaan lahan untuk perumahan menduduki proporsi terbesar, yaitu 48,41 persen dari luas daratan utama DKI Jakarta. Sedangkan luas untuk penggunaan bangunan industri, perkantoran dan perdagangan hanya mencapai 15,68 persen.

2.1.5 Keadaan Demografi

Pertumbuhan penduduk dapat dipengaruhi oleh kelahiran, kematian, dan migrasi. Pada tahun 2015 jumlah penduduk Provinsi DKI Jakarta mencapai 10.177.924 jiwa. Dilihat dari komposisi penduduk menurut jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki Provinsi DKI Jakarta tahun 2015 sebanyak 5.115.357 jiwa atau 50,25 persen dari jumlah keseluruhan penduduk, lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan yaitu sebanyak 5.062.567 jiwa atau 49,74 persen. Oleh karenanya, Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2015 memiliki *sex ratio* sebesar 101,04 penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan. Rincian perkembangan komposisi penduduk dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2

Perkembangan Jumlah Penduduk Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2015

No. (1)	Uraian (2)	Satuan (3)	SP2000 (4)	2012 (5)	2013 (6)	2014 (7)	2015 (8)
1.	Laki-laki	Jiwa	4.223.125	4.976.100	5.023.400	5.069.900	5.115.357
2.	Perempuan	Jiwa	4.123.958	4.886.000	4.946.500	5.005.400	5.062.567
3.	Jumlah	Jiwa	8.347.083	9.862.100	9.969.900	10.075.300	10.177.924
4.	Pertumbuhan	%	0,78	1,13	1,09	1,06	1,09
5.	Densitas	Ribu jiwa/ Km ²	12,60	14,89	15,05	15,23	15,37
6.	Sex Ratio	%	102,00	101,80	101,60	101,70	101,04

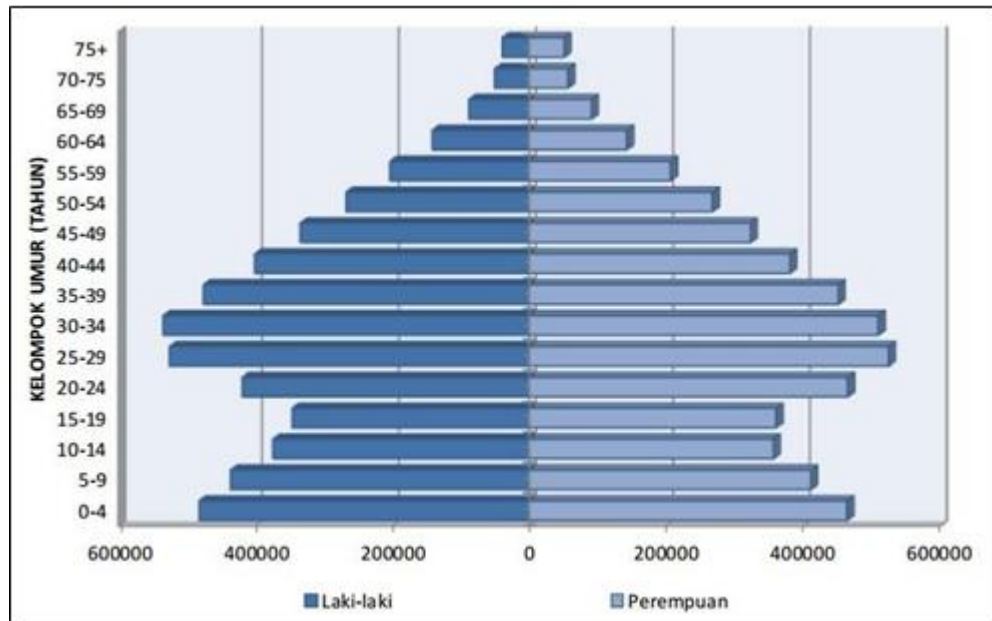
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta 2016

Jumlah penduduk Provinsi DKI Jakarta cenderung terus meningkat dari tahun ke tahun, dengan laju pertumbuhan pada tahun 2012 sebesar 1,13 persen, tahun 2013 sebesar 1,09 persen, tahun 2014 sebesar 1,06 persen, dan tahun 2015 sebesar 1,09 persen. Dengan kepadatan penduduk 15,37 ribu jiwa/Km², Provinsi DKI Jakarta merupakan Provinsi dengan kepadatan penduduk tertinggi dibandingkan dengan Provinsi lainnya di Indonesia.

Struktur penduduk Provinsi DKI Jakarta menunjukkan dominasi penduduk usia produktif (15-64) sebagaimana terlihat pada Gambar di bawah. Pada tahun 2015, penduduk usia produktif tercatat sebanyak 7.278.316 jiwa atau sebesar 71,51 persen dari total penduduk, penduduk yang belum produktif (0-14 tahun) sebanyak 2.523.715 jiwa atau 24,80 persen, dan penduduk yang tidak produktif lagi atau melewati masa pensiun sebanyak 375.893 atau 3,69 persen. Dengan struktur penduduk tersebut, angka ketergantungan (*dependency ratio*) DKI Jakarta pada tahun 2015 sebesar 28,49 persen yang berarti dari 100 penduduk usia produktif DKI Jakarta akan menanggung secara ekonomi sebesar 28,49 penduduk

usia tidak produktif. Struktur penduduk Provinsi DKI Jakarta tahun 2015 dapat dilihat melalui piramida penduduk pada gambar berikut:

Gambar 2.3



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta 2016

Secara umum, komposisi penduduk menurut jenis kelamin memiliki tren yang hampir sama antar wilayah Kota/Kabupaten Administrasi, yaitu penduduk laki-laki cenderung berjumlah lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan, hanya Kota Administrasi Jakarta Pusat dan Kota Administrasi Jakarta Utara yang memiliki penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki. Jumlah penduduk tertinggi adalah Kota Administrasi Jakarta Timur yaitu sebanyak 2.843.816 jiwa, sedangkan jumlah penduduk terendah terdapat pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yaitu sebanyak 23.340 jiwa. Rincian jumlah penduduk menurut Kota/Kabupaten Administrasi sebagaimana ditampilkan dalam Tabel berikut:

Tabel 2.3
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin di Kota/Kabupaten Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015

No	Kota/Kab. Administrasi	Jumlah Penduduk			Rasio Jenis Kela
1	Jakarta Pusat	457.025	457.157	914.182	99,97
2	Jakarta Utara	867.727	879.588	1.747.315	98.65
3	Jakarta Barat	1.246.288	1.217.272	2.463.560	102,38
4	Jakarta	1.096.469	1.089.242	2.185.711	100,66
5	Jakarta Timur	1.436.128	1.407.688	2.843.816	102,02
6	Kep. Seribu	11.720	11.620	23.340	100,86
Jumlah		5.115.357	5.062.567	10.177.924	101,04

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta 2016

Faktor utama yang dapat mempengaruhi jumlah penduduk di Provinsi DKI Jakarta yaitu jumlah kelahiran dan kematian. Secara keseluruhan, dari data registrasi kelahiran kematian perkawinan perceraian dan pengesahan/pengakuan anak BPS Provinsi DKI Jakarta, jumlah kelahiran dan kematian di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2015 tercatat sebanyak 146.284 kelahiran dan 49.710 kematian. Jumlah kelahiran tertinggi pada tahun 2015 terdapat pada Kota Administrasi Jakarta Timur sebanyak 42.586 kelahiran, sednagkan jumlah terendah terdapat pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebanyak 1366 kelahiran. Selanjutnya jumlah kematian terbanyak di Kota Administrasi Jakarta Timur sebanyak 14.885 kematian. Detil jumlah registrasi kelahiran dan kematian di masing-masing Kota/Kabupaten Administrasi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Registrasi Kelahiran dan Kematian Menurut Kota/Kabupaten Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015

Kota/Kabupaten	Kelahiran
----------------	-----------

No	Administrasi	Umum	Kematian
(1)	(2)	(3)	(6)
1	Jakarta Pusat	13.869	6.284
2	Jakarta Utara	26.339	8.186
3	Jakarta Barat	33.134	9.785
4	Jakarta Selatan	29.990	10.476
5	Jakarta Timur	42.586	14.885
6	Kep. Seribu	366	84
Jumlah		146.284	49.710

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta 2016

2.1.6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pengukuran keberhasilan pembangunan suatu negara tidak hanya ditandai oleh tingginya pertumbuhan ekonomi, namun juga mencakup kualitas manusianya. Oleh karena itu, konsep pengukuran keberhasilan pembangunan harus berorientasi kepada manusia atau masyarakatnya, yaitu bagaimana pertumbuhan ekonomi mampu dirasakan seluruh lapisan masyarakat dan meningkatkan kualitas masyarakat sebagai manusia. Pembangunan manusia yang mencakup tiga dimensi pokok yaitu kesehatan (umur panjang), pendidikan (pengetahuan) dan daya beli (standar kehidupan layak) dapat dilihat dari perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di suatu wilayah. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia pada tahun 2012 s.d. 2015 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.5
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi
DKI Jakarta Tahun 2012-2015

No. (1)	Uraian (2)	2012 (3)	2013 (4)	2014 (5)	2015 (6)	2016 (7)
1.	IPM Jakarta Pusat	78,44	78,81	79,03	79,69	80,22
2.	IPM Jakarta Utara	76,89	77,16	77,29	78,30	78,78
3.	IPM Jakarta Barat	78,05	78,79	79,38	79,72	80,34
4.	IPM Jakarta Selatan	81,72	82,72	82,94	83,37	83,94
5.	IPM Jakarta Timur	79,52	79,88	80,40	80,73	81,28
	IPM DKI Jakarta	77,53	78,08	78,39	78,99	79,60
	IPM Nasional	67,70	68,31	68,90	69,55	70,18

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta 2016

Berdasarkan data yang ada, Kota Administrasi Jakarta Selatan memiliki capaian IPM tertinggi dibandingkan wilayah lainnya di Provinsi DKI Jakarta. Capaian tersebut diikuti oleh wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur. Selain itu, dari data tersebut dapat dilihat juga bahwa IPM Provinsi DKI Jakarta selalu meningkat setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan peningkatan kualitas manusia yang ada di Jakarta, yang selanjutnya menjadi barometer bagi kualitas pembangunan manusia di Indonesia.

2.1.7 Panjang dan Luas Trotoar

Berdasarkan data BPS DKI Jakarta tentang panjang dan luas trotoar yang ada di DKI Jakarta pada 2009-2013 memiliki panjang dan luas yang sama yaitu memiliki panjang 540336,86 m dan luas 978483.08 m².

Tabel 2.6
Panjang dan Luas Trotoar di DKI Jakarta Tahun 2009-2013

NO.	Tahun	Panjang Trotoar (m)	Luas Trotoar (m²)
1	2009	540336,86	978483.08
2	2010	540336,86	978483.08
3	2011	540336,86	978483.08
4	2012	540336,86	978483.08
5	2013	540336,86	978483.08

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta 2015

2.2 Gambaran Umum Jakarta Pusat

Jakarta Pusat adalah nama sebuah kota administrasi di pusat Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Wilayah administrasi Jakarta Pusat mempunyai luas lahan sebesar : 48,17 km², dengan kondisi topografi relatif datar dan secara administratif dibagi menjadi : 8 kecamatan, 44 kelurahan, 394 Rukun Warga, dan 4662 Rukun Tetangga (bulan Januari, 2008). Jakarta Pusat adalah administrasi terkecil Provinsi DKI Jakarta. Pada zaman Hindia Belanda disebut *Batavia Centrum*.

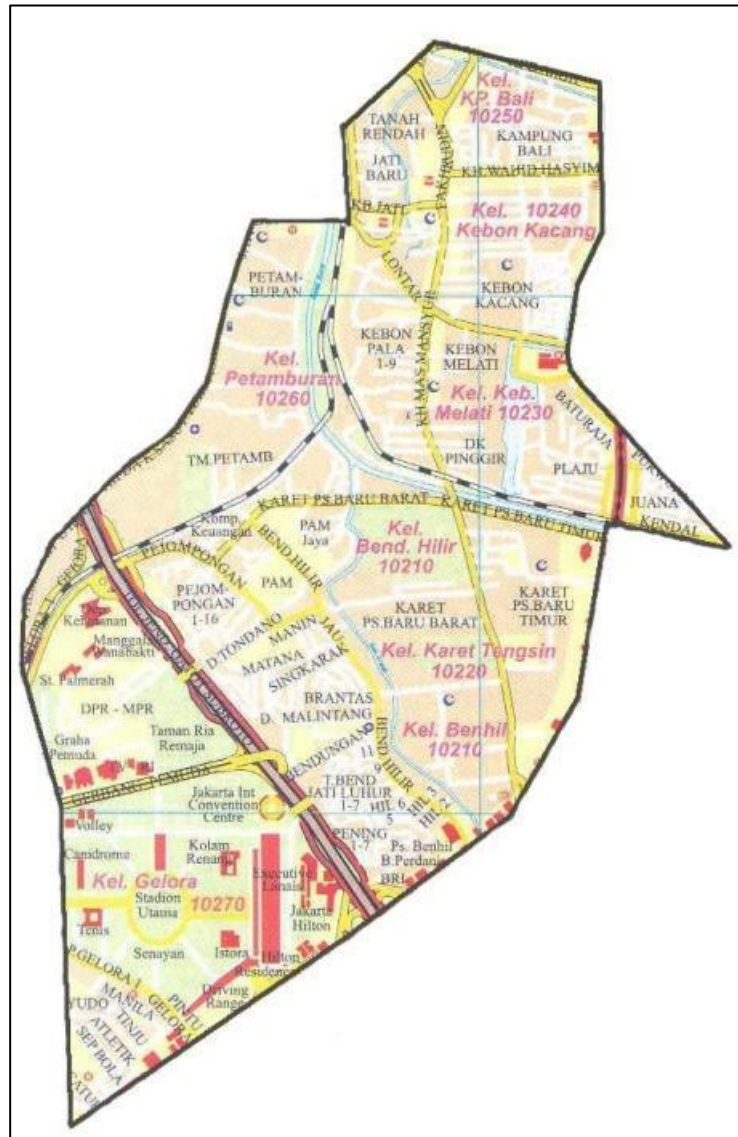
Jakarta Pusat menjadi jantung perekonomian dan pergerakan kegiatan di Provinsi DKI Jakarta, hal tersebut dikarenakan hampir mayoritas lembaga-lembaga dan instansi pemerintah yang mengurus kebutuhan daerah dan nasional berada pada wilayah kota administrasi Jakarta Pusat seperti kantor kementerian, kantor dinas, Bank Indonesia, dan Istana Negara yang kesemua itu terdapat di kota administrasi Jakarta Pusat.

1.3 Gambaran Umum Kecamatan Tanah Abang

2.3.1 Kondisi Geografis Kecamatan Tanah Abang

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 171 Tahun 2007, maka luas wilayah Kecamatan Tanah Abang adalah 9,3 km² (19,3 persen dari total luas wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat). Secara administrasi pemerintahan, Kecamatan Tanah Abang terdiri dari 7 kelurahan, yaitu Kelurahan Gelora, Bendungan Hilir, Karet Tengsin, Kebon Melati, Petamburan, Kebon Kacang, dan Kampung Bali.

Gambar 2.4
Peta Kecamatan Tanah Abang



Sumber: Statistik Kecamatan Tanah Abang 2016

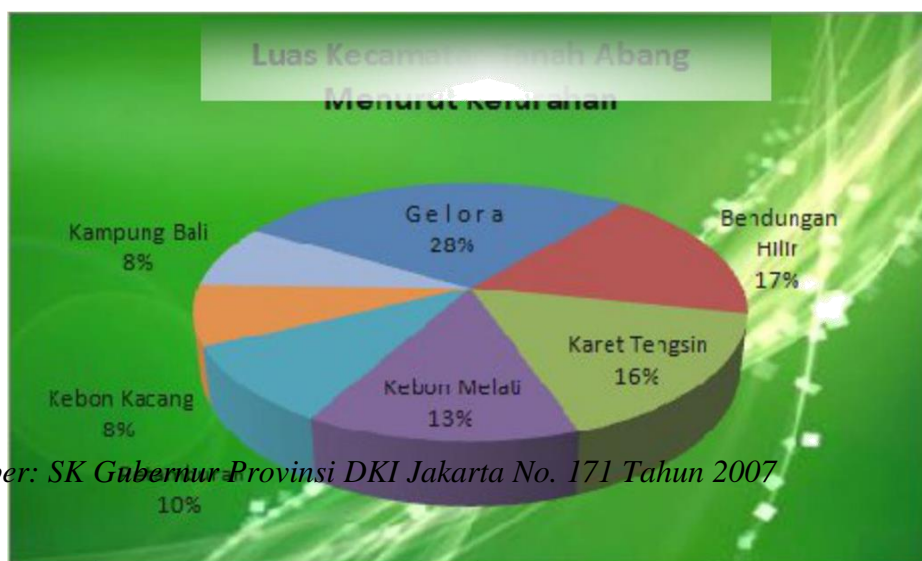
Kecamatan Tanah Abang merupakan salah satu kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Pusat. Kecamatan Tanah Abang merupakan daerah yang sebagian besar perkantoran, pusat perbelanjaan, dan pemukiman penduduk. Kecamatan Tanah Abang berbatasan langsung dengan Kecamatan Menteng di sebelah Timur, Kecamatan Gambir di sebelah Utara, Kecamatan Palmerah dan Kecamatan Kebayoran Lama di sebelah Barat, Kecamatan Kebayoran Baru dan

Kecamatan Setiabudi di sebelah Selatan. Sedangkan topografi permukaan daratan kecamatan ini relative datar.

Kelurahan Gelora merupakan kelurahan yang terluas dengan luas wilayah 2,59 km² sekitar 28 persen dari seluruh luas Kecamatan Tanah Abang dan kelurahan terkecil dengan luas wilayah 0,73 km² atau sekitar 8 persen dari seluruh luas wilayah Kecamatan Tanah Abang.

Gambar 2.5

Luas Kecamatan Tanah Abang Menurut Kelurahan



2.3.2 Pemerintahan Kecamatan Tanah Abang

Secara administrasi, Kecamatan Tanah Abang terbagi menjadi 7 kelurahan. Untuk mempermudah koordinasi dan pemantauan, setiap kelurahan dibagi menjadi beberapa rukun warga (RW) dan rukun warga dibagi menjadi beberapa rukun tetangga (RT).

Tabel 2.7
Jumlah RT dan RW di Kelurahan Tanah Abang Tahun 2016

Jumlah RT dan RW Menurut Kelurahan di Kecamatan Tanah Abang Tahun 2016			
Kelurahan	RW	RT	Rumah Tangga
Gelora	2	12	1.617
Bendungan Hilir	9	124	8.995
Karet Tengsin	9	70	6.807
Kebon Melati	15	147	12.250
Petamburan	11	119	12.640
Kebon Kacang	11	152	4.213
Kampung Bali	10	81	4.590
Jumlah	67	698	51.112

Sumber: Statistik Kecamatan Tanah Abang 2017

Kecamatan Tanah Abang terdiri dari 67 RW dan 698 RT. Pada tahun 2016, terdapat 51.112 rumah tangga. Kelurahan Kebon Melati memiliki RW terbanyak, yaitu 15 RW dan Kelurahan Kacang memiliki RT terbanyak yaitu 152 RT. Sedangkan jumlah rumah tangga terbanyak ada di Kelurahan Petamburan dengan jumlah 12.640 rumah tangga.

2.3.3 Demografi Kecamatan Tanah Abang

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk Tahun 2010, jumlah penduduk Kecamatan Tanah Abang adalah 144.459 orang yang terdiri atas 73.689 laki-laki atau sekitar 51,01 persen dari seluruh jumlah penduduk di Kecamatan Tanah Abang dan 70.770 perempuan atau sekitar 48,99 persen dari seluruh jumlah penduduk di Kecamatan Tanah Abang. Dari hasil Sensus Penduduk 2010 tersebut terlihat bahwa penduduk Kecamatan Tanah Abang paling banyak tinggal di Kelurahan Kebon Melati yaitu sebanyak 33.382 orang. Sedangkan jumlah penduduk paling sedikit ada di Kelurahan Gelora yaitu sebanyak 3.004 orang.

Tabel 2.8

Jumlah Penduduk Kecamatan Tanah Abang menurut Kelurahan Tahun 2000 dan 2010

Kecamatan	2000	2010
(1)	(2)	(3)
Gelora	4.008	3.004
Bendungan Hilir	23.119	21.070
Karet Tengsin	20.980	23.326
Kebon Melati	30.334	33.382
Petamburan	27.010	31.829
Kebon Kacang	23.306	20.661
Kampung Bali	12.470	11.187
Jumlah	141.227	144.459

Sumber: Sensus Penduduk 2000 dan 2010 BPS Jakarta Pusat

Jika dibandingkan dengan hasil Sensus Penduduk tahun 2000, Kecamatan Tanah Abang mengalami kenaikan penduduk sebesar 0,23 persen. Fenomena kenaikan jumlah penduduk tersebut tidak terjadi di seluruh kelurahan, hanya Karet Tengsin, Kebon Melati, dan Petamburan.

Dengan luas wilayah 9,3 km², maka rata-rata tingkat kepadatan penduduk Kecamatan Tanah Abang adalah 17.866 orang per km². Kelurahan Petamburan memiliki jumlah kepadatan penduduk tertinggi yaitu 43.882 orang per km². Kelurahan dengan tingkat kepadatan penduduk terendah adalah Kelurahan Gelora, yaitu 1.590 orang per km².

Tabel 2.9

Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk di Tanah Abang, Tahun 2013

Kecamatan	Luas (Km ²)	Kepadatan
(1)	(2)	(3)
Gelora	2,59	1.590
Bendungan Hilir	1,58	16.694
Karet Tengsin	1,53	9.965
Kebon Melati	1,26	31.322
Petamburan	0,90	43.882
Kebon Kacang	0,71	37.173
Kampung Bali	0,73	20.633
Jumlah	9,30	17.866

Sumber: BPS Kota Adm. Jakarta Pusat 2016

Dilihat dari laju pertumbuhan penduduk di Kecamatan Tanah Abang per tahun selama sepuluh tahun terakhir yakni dari tahun 2000-2010 sebesar 0,23 persen. Laju pertumbuhan penduduk tersebut berbandik terbalik dengan periode satu dekade sebelumnya (1990-2000) yang mengalami pertumbuhan negatif yaitu sebesar -3,03 persen. Laju pertumbuhan penduduk Kelurahan Petamburan adalah tertinggi dibanding dengan kelurahan lain di Kecamatan Tanah Abang yaitu sebesar 1,66 persen. Di sisi lain laju pertumbuhan penduduk terendah di Kelurahan Gelora yaitu sebesar -2,84 persen.

Tabel 2.10
Laju Pertumbuhan Penduduk Kecamatan Tanah Abang
Menurut Kelurahan, 1990-2000 Dan 2000-2010

Kecamatan	1990-2000	2000-2010
(1)	(2)	(3)
Gelora	0,63	-2,84
Bendungan Hilir	-2,15	-0,92
Karet Tengsin	-3,83	1,07
Kebon Melati	-4,84	0,96
Petamburan	-2,13	1,66
Kebon Kacang	-1,68	-1,20
Kampung Bali	-3,47	-1,08
Jumlah	-3,03	0,23

Sumber: Sensus Penduduk 1990-2000 dan 2010 BPS Jakarta Pusat

Jakarta merupakan magnet bagi penduduk dari daerah lain. Sehingga tidak heran jika tiap tahunnya banyak warga dari daerah lain yang mencoba peruntungannya di Jakarta dengan datang ke Jakarta untuk mengadu nasib baik yang memiliki keterampilan maupun tidak.

Kedatangan penduduk ini tentu saja mempengaruhi perkembangan jumlah penduduk di wilayah Jakarta, termasuk salah satunya ialah Kecamatan Tanah Abang. Pada tahun 2016 kedatangan penduduk masuk ke dalam Kecamatan Tanah Abang tercatat sebanyak 526 orang. Sedangkan penduduk yang pindah meninggalkan Kecamatan pada tahun 2015 sebanyak 320 orang.

Tabel 2.11

Jumlah Penduduk Yang Lahir, Mati, Datang, dan Pindah Di Kecamatan Tanah Abang 2016

Kelurahan	Lahir	Mati	Datang	Pindah
Gelora	11	1	10	3
Bendungan Hilir	25	9	32	78
Karet Tengsin	51	2	40	33
Kebon Melati	51	15	231	46
Petamburan	53	13	159	66
Kebon Kacang	33	6	44	50
Kampung Bali	17	7	10	26
Jumlah	241	53	526	302

Sumber: Statistik Kecamatan Tanah Abang 2017

2.3.4 Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan yang menjadi perhatian di negara berkembang, tidak terkecuali Indonesia. Oleh karena itu, berbagai strategi dilakukan sebagai upaya penanggulangan kemiskinan teruys dilakukan. Pada tahun 2005, BPS untuk pertama kalinya melaksanakan kegiatan Pendataan Sosial Ekonomi Penduduk 2005 (PSE05) yang menghasilkan data mikro tentang kemiskinan, yaitu data base Rumah Tangga Sasaran (RTS). Data hasil PSE05 tersebut kemudian dimutakhirkan pada tahun 2008 dengan nama Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS08).

Pada tahun 2009 dilakukan Pemutakhiran (Updating) Rumah Tangga Sasaran 2009 (UDRTS09) dan pada tahun berikutnya yaitu tahun 2010 dilakukan kembali pemutakhiran (Updating) Rumah Tangga Sasaran 2010 (UDRTS10). Data hasil empat kegiatan tersebut digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pengentasan kemiskinan.

Besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh garis kemiskinan karena penduduk miskin didefinisikan sebagai penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Jumlah rumah tangga miskin (RTS) di Kecamatan Tanah Abang pada tahun 2010 sebanyak 2.802 Rumah Tangga yang tersebar di 7 kelurahan atau 12,13 persen dari total RTS seKota Administasi Jakarta Pusat.

Tabel 2.12
Jumlah RTS Kecamatan Tanah Abang Menurut Kelurahan 2005-2010

Kelurahan	Jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS)			
	PSE 2005	PPLS 2008	UDRTS2009	UDRTS 2010
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Gelora	5	10	9	7
Bendungan Hilir	415	217	189	183
Karet Tengsin	296	276	266	222
Kebon Melati	1 082	1 648	1 485	1 438
Petamburan	580	639	624	467
Kebon Kacang	337	277	242	203
Kampung Bali	410	322	308	282
Jumlah	3 125	3 389	3 123	2 802

Sumber: BPS Jakarta Pusat 2017

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan suatu daerah pada tingkat mikro adalah berkurangnya daerah kumuh. Pada tahun 2010 jumlah RW kumuh di Kecamatan Tanah Abang sebanyak 12 RW. Kelurahan Petamburan dan Kampung Bali merupakan kelurahan yang paling banyak terdapat RW kumuh, yaitu masing-masing 3 RW.

Tabel 2.13

Jumlah RW Kumuh Kecamatan Tanah Abang Menurut Kelurahan 2013

Kelurahan	Jumlah RW
Gelora	-
Bendungan Hilir	1
Karet Tengsin	1
Kebon Melati	3
Petamburan	4
Kebon Kacang	-
Kampung Bali	3
Jumlah	12

Sumber: BPS Jakarta Pusat 2017

2.3.5 Perekonomian

Kecamatan Tanah Abang terkenal akan pusat perbelanjaannya. Di Tanah Abang terdapat beberapa macam pasar. Kecamatan Tanah Tanah memiliki 7 pasar tanpa bangunan, 48 mini market, 109 restoran/rumah makan, 381 warung/kedai makanan minuman dan 581 toko/warung kelontong. Sedangkan kelurahan yang memiliki mini market; restoran/rumah makan; warung/kedai makanan minuman; toko/warung kelontong terbanyak adalah Kelurahan Bendungan Hilir dan yang paling sedikit memiliki fasilitas tersebut adalah Kelurahan Karet Tengsin.

Tabel 2.14
Jumlah Pasar Menurut Jenis dan Kelurahan, 2016

Kelurahan	Pasar Tanpa Bangunan	Mini Market	Restoran/ Rumah Makan	Warung/ Kedai Makanan Minuman	Toko/ Warung Kelontong
Gelora	1	4	25	40	41
Bendungan Hilir	1	16	15	102	280
Karet Tengsin	1	3	4	76	9
Kebon Melati	1	8	15	35	25
Petamburan	1	8	12	40	56
Kebon Kacang	1	7	13	45	20
Kampung Bali	1	2	25	43	150
Jumlah	7	48	109	381	581

Sumber: Statistik Tahunan Kecamatan Tanah Abang 2017

1.4 Gambaran Umum Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta

2.4.1 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan DKI Jakarta

Dinas Perhubungan DKI Jakarta merupakan salah satu SKPD yang merupakan pelaksana fungsi eksekutif dan merupakan perangkat Pemerintah Daerah yang berkoordinasi untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik memiliki tugas pokok dan fungsi tersendiri yang berbeda dengan SKPD lain. Tugas pokok yang dimiliki Dinas Perhubungan DKI Jakarta telah

diatur sesuai dengan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 97 Tahun 2009 yaitu:

“Menyelenggarakan Tugas Perhubungan”

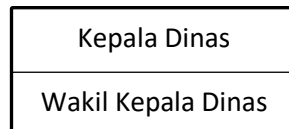
Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, fungsi Dinas Perhubungan adalah:

1. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Perhubungan;
2. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan perhubungan;
3. Penyelenggaraan di bidang perhubungan darat, perairan, dan laut;
4. Pembinaan dan pengembangan sistem perhubungan darat, perairan, laut, dan udara;
5. Pengawasan dan pengendalian sistem usaha dan kegiatan perhubungan darat, perairan, laut, dan udara;
6. Pengembangan sistem transportasi perkotaan;
7. Pelayanan, pembinaan, dan pengendalian perizinan, standarisasi/sertifikasi dan/atau rekomendasi di bidang perhubungan;
8. Penetapan lokasi, pengelolaan, dan pembinaan usaha perparkiran;
9. Penegakan peraturan perundang-undangan di bidang perhubungan;
10. Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor angkutan umum dan barang, dan pemeriksaan mutu karoseri kendaraan bermotor;
11. Penghitungan, pengawasan, dan evaluasi tarif angkutan jalan, perairan, dan laut;

12. Penataan, penetapan, pengawasan, dan evaluasi jaringan trayek angkutan jalan;
13. Pemungutan, penatausahaan, penyetoran, pelaporan, dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi di bidang perhubungan darat, perairan, laut, dan udara;
14. Penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan, dan perawatan prasarana dan sarana perhubungan;
15. Pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan perangkat daerah;
16. Pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang, dan ketatausahaan dinas perhubungan; dan
17. Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi.

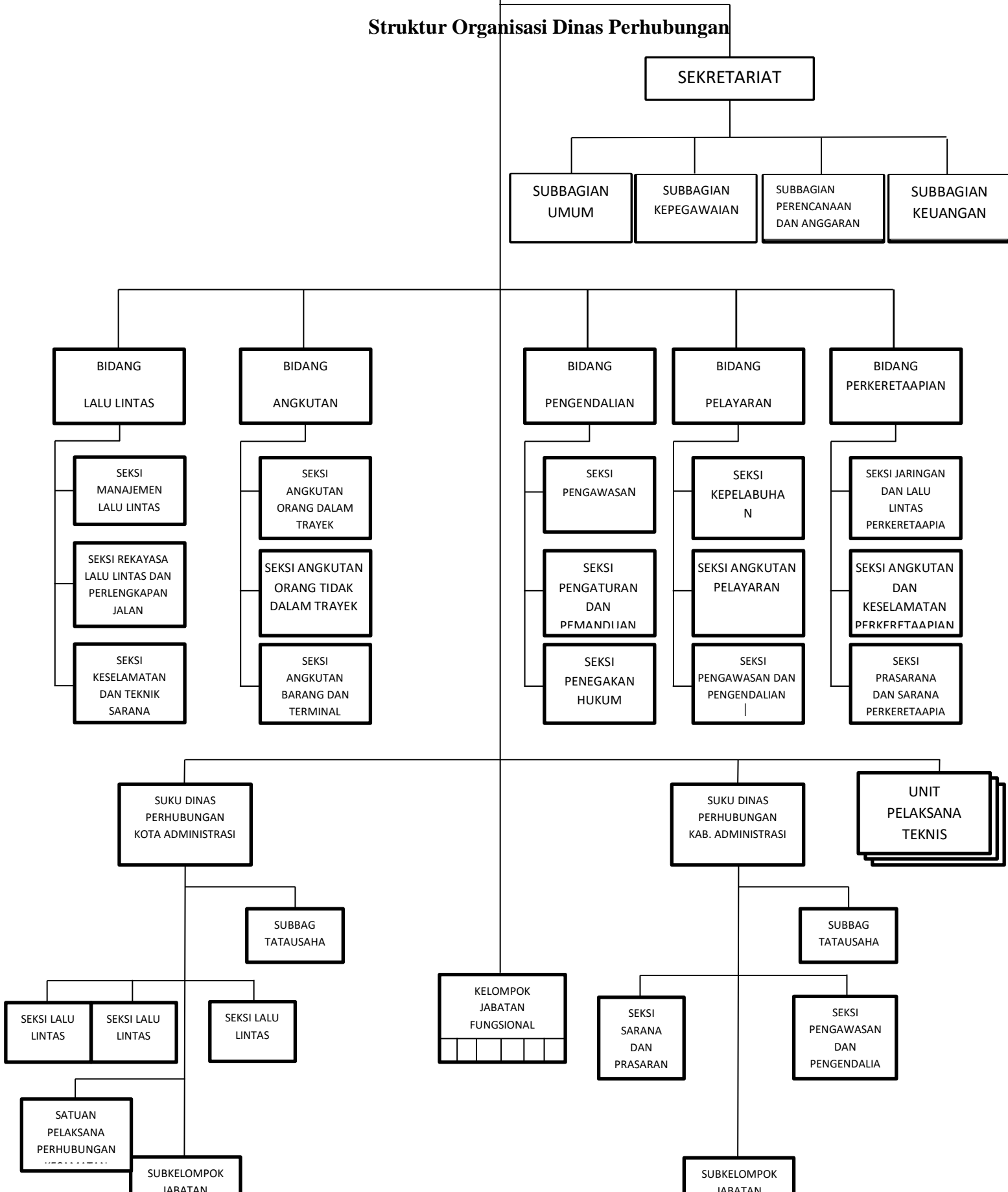
2.4.2 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan DKI Jakarta

Untuk dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi tersebut di atas, Dinas Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala yang membawahi, 5 Kepala Bidang, 1 Sekretariat, 5 Suku Dinas kota administrasi, 1 Suku Dinas kabupaten administrasi Kep. Seribu, 7 Kepala UP/UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 2.6

Struktur Organisasi Dinas Perhubungan



2.4.3 Visi-Misi Dinas Perhubungan DKI Jakarta

Dinas Perhubungan memiliki visi dan misi yang menjadi acuan dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya. Visi dari Dinas Perhubungan yaitu:

“Mewujudkan Jakarta Baru melalui penyediaan layanan transportasi yang handal, modern, dan berdaya saing ditingkat Asia, dengan angkutan publik sebagai layanan utama.”

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, Dinas Perhubungan memiliki 4 misi sesuai dengan peran-peran Dinas Perhubungan. Misi dari Dinas Perhubungan yaitu:

1. Mewujudkan layanan transportasi yang selamat, lancar, aman, nyaman, dan terintegrasi;
2. Mewujudkan layanan transportasi yang informatif berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
3. Mewujudkan transportasi ramah lingkungan dan menunjang aksesibilitas bagi penyandang disabilitas;
4. Mewujudkan biaya transportasi yang terjangkau bagi masyarakat.

2.4.4 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan DKI

Jakarta

2.4.4.1 Tujuan

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi di atas, Dinas Perhubungan menetapkan 4 (empat) tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, sebagai berikut:

1. Meningkatkan infrastruktur dan menambah sarana transportasi umum perkotaan sebagai upaya utama dalam mengatasi permasalahan kemacetan lalu lintas;
2. Meningkatkan sistem sarana, prasarana dan regulasi pendukung pengendalian lalu lintas;
3. Menyediakan sarana transportasi yang ramah lingkungan dan membangun prasarana transportasi bagi kendaraan tak bermotor;
4. Mewujudkan biaya transportasi yang terjangkau oleh seluruh masyarakat

2.4.4.2 Sasaran

Untuk memastikan pencapaian tujuan yang diharapkan seperti di atas berkualitas, maka sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan DKI Jakarta dijabarkan sebagai berikut:

1. Sasaran dari tujuan pertama adalah:
 - a. Tersedianya penambahan sarana transportasi perkotaan;
 - b. Berkurangnya titik rawan kemacetan;

- c. Terlaksananya pengembangan sistem transportasi wilayah;
 - d. Meningkatkan keselamatan transportasi;
 - e. Terselenggaranya angkutan perairan yang memadai
 - f. Tersedianya dasar pengembangan transportasi udara;
 - g. Terwujudnya pengembangan sarana dan prasarana pendukung sistem transportasi.
2. Sasaran dari tujuan kedua adalah Terlaksananya peningkatan sistem prasarana pengendalian lalu lintas dan angkutan
 3. Sasaran dari tujuan ketiga adalah:
 - a. Tersedianya prasarana transportasi kendaraan tak bermotor
 - b. Tersedianya sarana transportasi yang ramah lingkungan
 4. Sasaran dari tujuan keempat adalah Terwujudnya biaya-biaya transportasi yang terjangkau oleh masyarakat

1.5 Gambaran Umum Satpol PP Provinsi DKI Jakarta

2.5.1 Tugas Pokok dan Fungsi Satpol PP Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, pasal 4 menyatakan bahwa tugas pokok dari Satpol PP yaitu:

“Menegakan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.”

Sedangkan fungsi Satpol PP terdapat pada pasal 5 dimana Satpol PP memiliki fungsi yaitu:

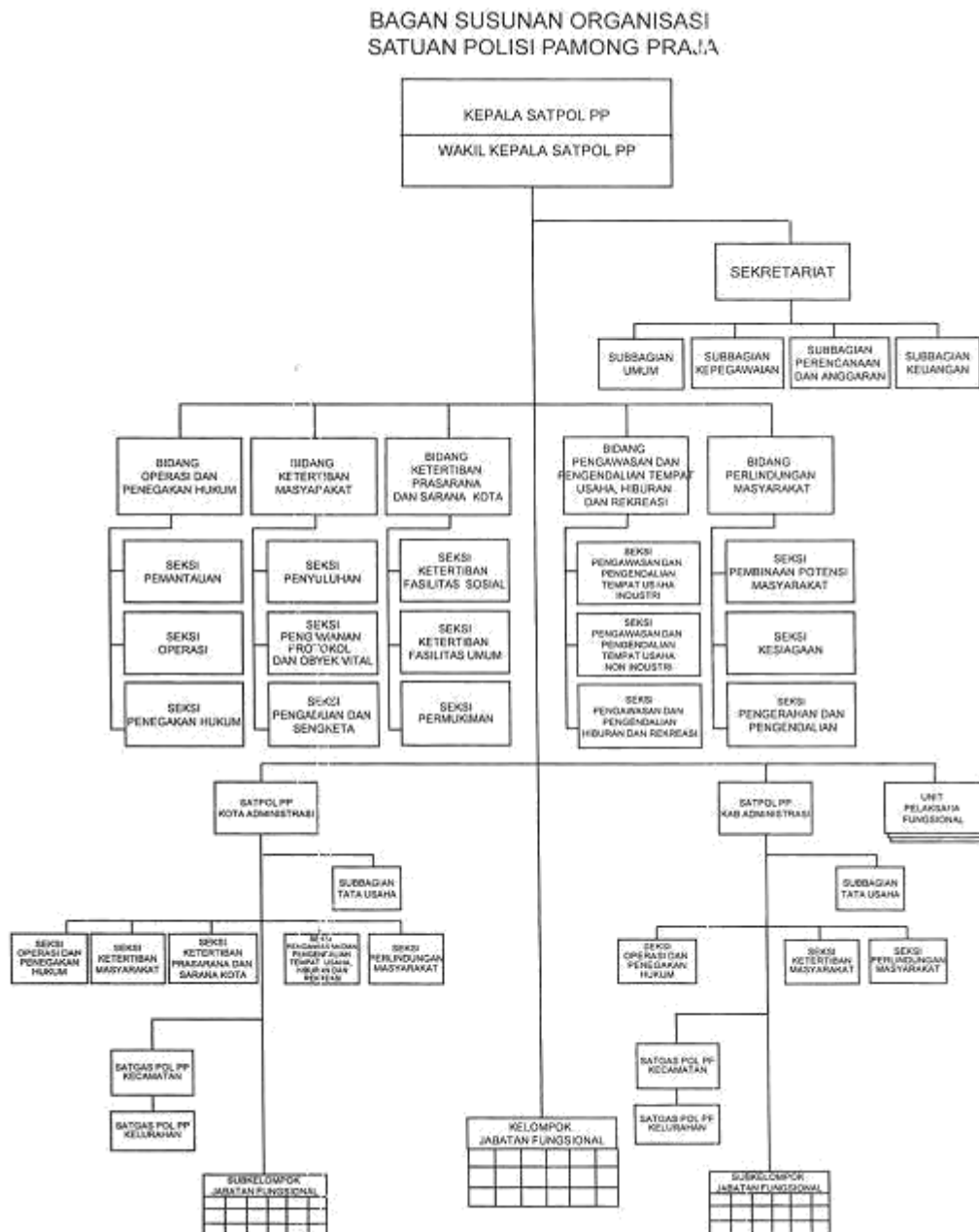
1. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
2. Pelaksanaan kebijakan penegakkan Perda dan peraturan Kepala Daerah;
3. Pelaksanaan kebijakan perlindungan msayarakat;
4. Pelaksanaan koordinasi penegakkan Perda dan peraturan kepala daera, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dngan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparatur lainnya;
5. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dari peraturan kepala daerah; dan
6. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah.

2.5.2 Struktur Organisasi Satpol PP DKI Jakarta

Untuk dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi tersebut di atas, Satpol PP dipimpin oleh seorang Kepala yang membawahi, 5 Kepala Bidang, 1 Sekretariat, 5 Suku Dinas kota administrasi, 1 Suku Dinas kabupaten administrasi Kep. Seribu, Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 2.7

Struktur Organisasi Satpol PP DKI Jakarta



2.5.3 Visi-Misi Satpol PP DKI Jakarta

Satpol PP DKI Jakarta memiliki visi dan misi yang menjadi acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Visi dari Satpol PP DKI Jakarta yaitu:

“Mewujudkan Jakarta Baru yang tertib dan tenteram dengan berorientasi pada pelayanan publik.”

Untuk mencapai visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata sebagai langkah utama sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satpol PP Provinsi DKI Jakarta yang dirumuskan dalam misi Satpol PP DKI Jakarta, sebagai berikut:

1. Menjaga serta memelihara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
2. Meningkatkan peran serta dan kemampuan masyarakat dalam memelihara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan, prasarana, dan sarana serta kemampuan aparaturnya dalam penanganan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

2.5.4 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satpol PP DKI Jakarta

2.5.4.1 Tujuan

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi di atas, Satpol PP Provinsi DKI Jakarta menetapkan 3 (tiga) tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, sebagai berikut:

1. Terimplementasinya Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah
2. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memelihara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
3. Terwujudnya kelembagaan yang efektif dan efisien dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.
4. Tersedianya sarana dan prasarana yang mampu meningkatkan profesionalisme aparat Satpol PP.
5. Terbentuknya aparat Satpol PP yang profesional dan handal dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

2.5.4.2 Sasaran

Untuk memastikan pencapaian tujuan di atas serta menjaga kualitas maka ditetapkan sasaran Jangka Menengah Satpol PP Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut:

1. Sasaran dari tujuan pertama adalah:
 - a. Menurunnya tingkat pelanggaran Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
 - b. Meningkatnya penanganan dan penyelesaian pengaduan pelanggaran Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
 - c. Terjalinnnya koordinasi dengan instansi terkait dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
2. Sasaran dari tujuan kedua adalah:

- a. Meningkatnya pengetahuan, kesadaran, dan keterlibatan masyarakat dalam menciptakan dan memelihara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
 - b. Meningkatnya koordinasi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam memelihara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
3. Sasaran dari tujuan ketiga adalah meningkatnya keselarasan kebijakan, pembiayaan, kelembagaan, operasional dan perencanaan interna Satpol PP.
4. Sasaran dari tujuan keempat adalah:
- a. Meningkatnya kesiapan Kendaraan Dinas Operasional Satpol PP dalam kondisi prima.
 - b. Meningkatnya kesiapan Alat Keamanan Satpol PP dalam kondisi prima.
 - c. Meningkatnya rasio Kendaraan Dinas Operasional Satpol PP terhadap jumlah aparat Satpol PP.
 - d. Meningkatnya rasio Alat Keamanan Satpol PP terhadap jumlah aparat Satpol PP.
 - e. Tersedianya fasilitas barak bagi aparat operasional Satpol PP.
5. Sasaran dari tujuan kelima adalah:
- a. Meningkatnya jumlah aparat satpol PP yang memiliki kemampuan Pol PP tingkat dasar.

- b. Meningkatnya kemampuan aparat Satpol PP dalam bidang pengendalian gubuk/bangunan liar.
- c. Meningkatnya kemampuan aparat Satpol PP dalam bidang pengendalian PKL.
- d. Meningkatnya kemampuan aparat Satpol PP dalam bidang pengendalian PMKS.
- e. Meningkatnya kemampuan aparat Satpol PP dalam bidang pengendalian tempat usaha.